
**KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KABUPATEN KARO DENGAN DINAS SOSIAL DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA ERUPSI
GUNUNG SINABUNG**

Figlia Forlana Sigit¹, Dr. Simson Ginting, S.Sos., MPA²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ola.sigita@yahoo.com¹, simson.ginting@usu.ac.id²

Abstract: *The eruption of Mount Sinabung is one of the natural disasters that occurred in Indonesia, for this reason it is necessary to have a countermeasure carried out, for this reason several agencies in Karo Regency have coordinated, namely the Karo Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) with the Karo Regency Social Service. the research method that the author uses in this research is a descriptive method with a qualitative approach. In the results of the study it can be concluded that the coordination of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) with the Karo district social service in managing the Mount Sinabung eruption disaster still needs to be improved and improved. Regional Disaster Management (BPBD) Karo Regency with the Karo Regency Social Service regarding their respective roles or tasks. The slow process of disaster management was caused by fragmentary funds which resulted in the community not **being aware of assistance in relocation during the eruption of Mount Sinabung.***

Keywords: *Coordination; Disaster Management; Mount Sinabung Eruption*

Abstrak: erupsi gunung sinabung merupakan salah satu bencana alam yang terjadi di Indonesia, untuk itu perlu adanya suatu penanggulangan yang dilakukan, untuk itu beberapa instansi yang ada di kabupaten karo sudah melakukan koordinasi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dengan Dinas Sosial Kabupaten Karo. metode penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan dinas sosial kabupaten karo dalam penanggulangan bencana erupsi gunung sinabung masih harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi.. Dalam masalah Relokasi ketika sebelum atau sesudah erupsi terjadi namun terlihat masih kurangnya komunikasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dengan Dinas Sosial Kabupaten Karo terkait peranan atau tugas masing-masing, Lambatnya proses penanggulangan bencana disebabkan oleh dana yang tessekat-sekat hingga mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui adanya bantuan dalam relokasi ketika erupsi Gunung Sinabung.

Kata kunci: Koordinasi; Penanggulangan Bencana; Erupsi Gunung Sinabung

PENDAHULUAN

Saat ini bencana alam sering melanda Indonesia berbagai faktor yang mempengaruhi hal tersebut seperti kondisi geografis, geologis, hidrologis serta demografis. Tentu saja dampak dari bencana alam dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi seluruh makhluk hidup terutama manusia. Salah

satu kerugian yang ditimbulkan dari Bencana alam adalah tertahannya suatu pembangunan yang akan atau sedang dicapai.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang rawan akan dengan bencana alam, sepanjang tahun 2020 terdapat lebih kurang 207 kejadian bencana alam seperti banjir, gempa, tanah

longsor hingga meletusnya gunung berapi. Salah satu gunung yang masih aktif dan sering kali mengalami erupsi adalah gunung sinabung yang berada di kabupaten karo sumatera utara, dampak dari letusan gunung sinabung menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat sekitar yang berdampak dari letusan gunung. Sebanyak 795 kartu keluarga mengalami kerugian yang mengakibatkan mereka harus mengungsi dikarenakan tempat tinggal atau rumah mereka yang sudah tidak layak untuk dihuni, selain itu sektor pencaharian mereka juga mengalami kerugian. Dari total luas 12.399,16 Ha lahan pertanian yang rusak menyebabkan kerugian yang dicapai sebesar Rp 898.893.186.541,34. Hal ini merupakan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat Kabupaten Karo.

Demi menyelesaikan dan menuntaskan masalah Relokasi bagi korban bencana erupsi gunung meletus maka pemerintah Indonesia telah menetapkan suatu kebijakan dalam hal penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan melalui undang-undang tersebut maka lembaga seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mendapatkan posisi yang lebih kuat serta diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dalam melaksanakan berbagai tahap penanggulangan bencana. Dalam undang-undang tersebut, kegiatan koordinasi antar lembaga yang ada di setiap daerah merupakan salah satu fungsi penting dalam melaksanakan Relokasi tempat tinggal penduduk yang berdampak bencana alam seperti meletusnya gunung berapi. Dan dalam bencana Erupsi Gunung Sinabung perlu adanya Koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Sosial dalam hal Relokasi..

Dalam melaksanakan koordinasi ini tidaklah semudah yang diharapkan,

pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan ataupun masalah-masalah pada masa sebelum dan pasca bencana, Ketika sebelum bencana terjadi Koordinasi dalam masalah Relokasi penduduk masih sangat minim, dimana terlihat kurangnya Koordinasi antara BPBD dengan Dinas Sosial dalam menentukan bagaimana proses Relokasi Penduduk dari tempat asal ke tempat pengungsian dan pada Pasca Bencana adanya masalah kesenjangan stakeholders yang berkepentingan dimana masing-masing stakeholders hanya saling menuduh ketidaksiagaan stakeholders yang lain dalam menangani bencana. Sehingga terjadi keterlambatan penanganan bencana dan menyebabkan koordinasi belum terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemasalahan lainnya dalam koordinasi yaitu kurangnya komunikasi, perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawaban tiap-tiap satuan (unit) yang kurang jelas sehingga prosedur dan tata kerja menjadi berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.

Permasalahannya sekarang ini adalah bagaimana BPBD Kabupaten Karo mampu melaksanakan fungsi koordinasinya secara internal dan juga dengan instansi lain yang terkait dalam upaya penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung. Apalagi melihat usia pembentukan BPBD Kabupaten Karo yang masih cukup baru. Terdapat beberapa masalah di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dan salah satunya adalah masih kurang baik dan kurang terarahnya koordinasi dari BPBD Kabupaten Karo dengan instansi terkait dalam Relokasi Penduduk Ketika terjadi Erupsi Gunung Sinabung sehingga membuat masyarakat bingung dan pergi menyelamatkan diri masing-masing tanpa ada arah dan tujuan yang pasti harus mengungsi kemana. Dari permasalahan yang dihadapi pada Koordinasi BPBD dengan Dinas Sosial.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dengan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung.”

METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan menggunakan kutipan, kalimat naratif, dialog antar tokoh. Pada metode ini tidak menggunakan angka.

Lokasi penelitian ini berada di beberapa tempat, yaitu pada lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo yang merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo yang beralamat di Jl. Veteran No 50, Ketaren, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22152. Peneliti merasa perlu untuk mengkaji kembali mengenai penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung karena dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo masih terkesan lamban dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dalam hal ini yaitu Dinas Sosial untuk penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung.

Adapun lokasi penelitian lainnya yaitu pada Dinas Sosial Kabupaten Karo yang beralamat di Jl. Pahlawan No 19, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22111. Adapun alasan pemilihan lokasi ini karena Dinas Sosial menjadi salah satu instansi pemerintah yang menyalurkan bantuan kepada para korban erupsi Gunung Sinabung yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, maka dari itu peneliti

merasa perlu melakukan penelitian pada Dinas Sosial. Sedangkan informasi yang dibutuhkan dari masyarakat adalah bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja BPBD dan Dinas Sosial menanggulangi bencana erupsi gunung Sinabung. Pada suatu bencana yang berdampak terhadap masyarakat, instansi yang terlibat diantaranya BPBD dan Dinas Sosial. BPBD bertugas sebagai penanggung jawab terhadap dinas-dinas yang terkait dimana salah satunya adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial hanya sebagai pendukung dan menunggu arahan dari BPBD serta bertugas dalam perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat sehingga Dinas Sosial menjadi salah satu garda terdepan dalam menanggulangi bencana erupsi gunung Sinabung. Suatu bencana akan menimbulkan rasa traumatik dan mempengaruhi psikis korban.

Dalam hal ini, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk membantu menangani psikis korban. Selain itu Dinas Sosial juga harus memiliki rumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi pelaporan dibidang perlindungan sosial bagi korban bencana erupsi gunung Sinabung sehingga Dinas Sosial dipilih menjadi salah satu informan untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang diambil dalam melindungi korban bencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penanggulangan bencana, agar mencapai hasil yang efektif maka organisasi pemerintahan tidak boleh berjalan sendiri tapi dibutuhkan kerjasama dengan organisasi lain baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan lainnya. Pada bab pembahasan ini, mengenai hal koordinasi BPBD Kabupaten Karo dengan Dinas Sosial Kabupaten Karo peneliti berfokus membahas masalah Relokasi Penduduk pada saat terjadi bencana Erupsi Gunung Sinabung dan menggunakan teori yang disampaikan oleh Handyaningrat untuk

menguji masalah tersebut. Adapun Teori tersebut memperkenalkan 5 indikator dalam koordinasi yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan.

Komunikasi

Komunikasi merupakan bentuk koordinasi terkait dengan informasi, alur informasi maupun teknologi informasi. Komunikasi berperan penting agar gerak kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada bawahannya harus dengan komunikasi.

Kesadaran Pentingnya Koordinasi

koordinasi antara setiap instansi dalam melakukan penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung sudah baik dalam melakukan setiap bagian tugas yang diberikan karena erupsi Gunung Sinabung tidak hanya sekali terjadi. Dalam pembagian tugas tersebut, setiap instansi memiliki tugasnya masing-masing yang dikategorikan dalam tiga tahap Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa koordinasi BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Karo terkait kesadaran pentingnya koordinasi sudah terwujud dengan baik karena kegiatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung bukan sekali atau dua kali dilakukan melainkan sudah beberapa kali sehingga para pelaksana telah paham tugasnya masing-masing dan kegiatan yang berulang tersebut membuat para pelaksana mampu meminimalisir kendala yang ada di lapangan.

Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan terkait dengan pihak berwenang yang terlibat dan ahli di bidang pembangunan. Koordinasi BPBD Kabupaten Karo dan Dinas Sosial Kabupaten Karo melibatkan pihak yang berwenang dan ahli dibidang pembangunan. Keterlibatan pihak berwenang tentunya ahli dibidangnya masing-masing dan tidak ada tugas yang timpang tindih. Selain melibatkan pihak yang ahli dibidang pembangunan khususnya pembangunan fisik, koordinasi BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Karo juga melibatkan pihak yang ahli dibidang pembangunan psikososial masyarakat yang berada di pengungsian. Pembangunan psikososial masyarakat diperlukan agar korban bencana yang menghadapi gangguan dapat mampu keluar dari masalah trauma. Hal ini mengingat bahwa peristiwa bencana alam umumnya membawa pengaruh besar bagi korban termasuk kehilangan harta benda bahkan jiwa (Septiyana, 2019:7). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat diketahui bahwa koordinasi BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung terkait kompetensi partisipan telah melibatkan pihak-pihak yang berwenang ahli dibidangnya serta ahli dibidang pembangunan baik fisik dan psikososial seperti jika terjadi bencana ada korban jiwa dan pengungsi maka berkaitan dengan Dinas Sosial. Kalau terjadi erupsi gunung Sinabung ada tanaman yang rusak maka yang bertugas yaitu Dinas Pertanian.

Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi merupakan bentuk koordinasi mengenai bentuk kesepakatan, sanksi bagi pelanggar kesepakatan dan insentif bagi pelaksana koordinasi. Hal tersebut merupakan salah satu indikator

penting mendukung keberhasilan suatu koordinasi. Terkait kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi telah diwujudkan dengan baik dalam koordinasi BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa koordinasi BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung tidak terdapat kesepakatan secara langsung antara BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Karo, melainkan kesepakatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang telah mengatur tugas masing-masing OPD.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti ditemukan bahwa koordinasi BPBD Kabupaten Karo dengan Dinas Sosial Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung dapat diketahui segala potensi yang ada telah dikerahkan untuk mencapai sasaran yaitu menanggulangi bencana erupsi gunung Sinabung sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi organisasi. Masyarakat yang berada di relokasi Siosar terdiri dari tiga desa yaitu Desa Simacem, Desa Sukameriah dan Desa Bekerah merasakan bahwa koordinasi BPBD dan Dinas Sosial telah maksimal dan sesuai sasaran seperti saat berada di pengungsian diberikan bantuan berupa sembako dan uang, disediakan fasilitas dapur umum, dan disediakan tempat pengungsian yang layak serta saat berada di relokasi disalurkan bantuan untuk fakir miskin, bantuan isi hunian rumah dan disediakan fasilitas umum seperti gereja, sekolah, kendaraan umum, dan lahan untuk berladang.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dapat diketahui bahwa insentif koordinasi tidak ada karena BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Karo beserta OPD lainnya bertindak sebagai Aparatur Sipil Negara. Namun, apabila di lapangan terjadi bencana ada dapur umum di lokasi

kejadian, maka secara aturan dapat diusulkan untuk menerima uang yang dinamakan uang lelah yang berjumlah pada saat ini Rp 100.000 perhari jikalau dahulu berjumlah Rp 50.000 perhari. Uang lelah ini dari BPBD yang berasal dari dana siap pakai atau dana yang ada di rekening daerah, walaupun sudah melakukanajuan dana ke pusat namun butuh proses terlebih dahulu lalu uang tersebut diterima, maka dari itu kami menerima dana siap pakai yang diberikan dari BPBD.

Kontinuitas Perencanaan

Koordinasi pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin untuk pencapaian tujuan dengan hasil yang maksimal sehingga perencanaan menjadi sangat penting dalam hal ini. Adapun kontinuitas perencanaan berkaitan dengan umpan balik dari obyek dan subjek pembangunan dan perubahan terhadap hasil kesepakatan. Terkait umpan balik dari obyek dan subjek pembangunan Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti temukan bahwa berkaitan dengan perubahan hasil kesepakatan dalam koordinasi BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Karo yaitu apabila kebutuhan pengungsi yang sudah tidak relevan lagi akan diganti, misalnya dulu diberikan alat-alat rumah tangga namun sekarang sudah tidak relevan lagi karena masyarakat sudah memiliki itu semua jadi diganti dengan kebutuhan lainnya, misalnya apakah diganti dengan kebutuhan pertaniannya. Kemudian, di tempat pengungsi tiba-tiba erupsinya mengarah ke tempat pengungsi, jadi mencari lahan dan tempat tinggal baru lagi untuk pengungsi, dan pasti menelan biaya juga, makanya kesepakatan juga bisa berubah sesuai apa yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti ditemukan bahwa koordinasi BPBD Kabupaten Karo dengan Dinas Sosial Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi gunung

Sinabung dapat diketahui terdapat beberapa kendala. BPBD Kabupaten Karo memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah cukup memadai dibanding sebelum terbentuknya BPBD Kabupaten Karo meskipun jumlah SDM yang berkualitas kurang memadai. Selain itu, permasalahan biaya anggaran penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung dan prosedur penanggulangan saat ini sudah cukup teratasi. Berbeda sebelum dibentuk BPBD Kabupaten Karo berbagai masalah yang dialami dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung yaitu masih terdapat beberapa kendala yang dialami terkait dengan kesediaan lahan pemukiman masyarakat yang direlokasi. Hal lainnya ditemukan masalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, jumlah SDM yang berkualitas yang kurang memadai dan informasi yang terlambat.

Sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Karo telah memiliki kesediaan logistik yang memadai, dan adanya anggaran untuk Jaminan Hidup bagi para pengungsi, adanya pendanaan yang diberikan bagi para pengungsi yang kembali dirumah untuk mengisi rumahnya dengan perabotan rumah tangga dan disalurkan bantuan-bantuan sosial oleh BPBD Kabupaten Karo dan Dinas Sosial Kabupaten Karo, serta masyarakat juga mendapat bantuan dari relawan dan donatur. Namun, terdapat kendala yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Karo yaitu dalam menyalurkan bantuan sosial terkait data-data para pengungsi yang tidak masuk sebagai penerima bantuan karena sudah keluar dari pengungsian dan tidak menginformasikan kepada koordinator di pengungsian.

SIMPULAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo merupakan Lembaga non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Karo. Dinas

Sosial Kabupaten Karo adalah unsur pelaksana tugas pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan perumusan masalah pada penelitian yaitu bagaimana koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo (BPBD) dengan Dinas Sosial Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung, maka peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi antara BPBD dan Dinas Sosial dalam Relokasi Penduduk Ketika penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung belum maksimal. Berdasarkan konsep Handayaniingat ada beberapa kategori dalam memahami suatu koordinasi organisasi terutama melihat koordinasi BPBD dan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung, yaitu:

Komunikasi, berkaitan dengan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dengan Dinas Sosial Kabupaten Karo dalam Relokasi Penduduk Ketika penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung masih belum maksimal dalam penyampaian informasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dengan Dinas Sosial Kabupaten Karo. Ada informasi dalam Relokasi Penduduk ketika penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung hanya saja informasi yang disampaikan masih kurang jelas, seperti halnya dalam penyampaian informasi tidak dapat langsung disampaikan kepada instansi terkait, karena harus melalui group whatsapp yang dimana terkadang bergantung terhadap signal dari handphone masing-masing anggota organisasi dan kemudian dapat terhambatnya hal-hal yang harusnya dilakukan dalam waktu cepat, kemudian BPBD Kabupaten Karo dan Dinas Sosial Kabupaten Karo memiliki alur informasi yang cukup bagus, dimana alur informasi tersebut berawal dari petugas yang bertugas untuk mengawasi gunung yaitu vulkanologi dan disampaikan melalui group whatsapp atau

berkumpul disuatu titik kumpul. Antara BPBD Kabupaten Karo dan Dinas Sosial Kabupaten Karo sampai saat ini teknologi informasi yang digunakan hanya menggunakan group whatsapp atau melalui telepon antar instansi terkait. Dari beberapa pendapat anggota organisasi antar instansi tersebut mengatakan informasi sudah cukup baik sampai saat ini dan akan terus ditingkatkan dalam hal penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung.

Kesadaran pentingnya koordinasi, dari BPBD Kabupaten Karo dan Dinas Sosial Kabupaten Karo sendiri merasa penting dengan adanya koordinasi, karena dengan adanya koordinasi suatu pekerjaan dapat selesai dengan berkelompok. Untuk tingkat pengetahuan pelaksana dari BPBD Kabupaten Karo dan Dinas Sosial Kabupaten Karo sudah cukup paham dalam menangani bencana tersebut, sudah mengetahui apa saja yang menjadi tugas di tiap-tiap bidang yang bersangkutan dengan penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Karo dan Dinas sosial Kabupaten Karo sendiri memiliki tingkat kepatuhan terhadap hasil koordinasi, dari beberapa pendapat yang didapatkan dari hasil wawancara pegawai BPBD Kabupaten Karo dan Dinas Sosial Kabupaten Karo terkait pasti patuh terhadap hasil keputusan karena hasil keputusan akhir adalah hasil yang paling terbaik dalam menjalankan kegiatan. Oleh karena itu, anggota organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan hasil koordinasi yang telah dirundingkan bersama-sama akan menghasilkan hal yang baik.

Kompetensi partisipan, dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung ini pasti banyak yang terlibat, seperti yang tertulis dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, yaitu pejabat sekalipun pasti akan terlibat dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung, Bupati

menyampaikan arahan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana kepada instansi yang terkait, mulai dari TNI/Polri, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan masih banyak lagi instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung. Dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung tersebut adanya ahli dibidang pembangunan yang terlibat yang langsung diarahkan oleh BNPB tidak berkaitan dengan BPBD maupun Dinas Sosial.

Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordianasi, dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung memiliki kesepakatan yang telah tertulis pada SK Bupati Karo Nomor 361/178/BPBD/2016 karena hasil kesepakatan tersebut sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Bupati, dalam hal pelaksana kegiatan penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung ini pasti ada karena setiap instansi memiliki ketua pelaksana yang berkomunikasi dengan ketua pelaksana instansi lainnya lalu mengarahkan anggota untuk melakukan kegiatan tersebut. BPBD Kabupaten Karo dan Dinas Sosial Kabupaten Karo tidak membuat keputusan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar kesepakatan, dan juga untuk insentif dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung ini tidak ada insentif untuk anggota organisasi hanya saja mereka memiliki dana untuk kondisi darurat, insentif juga tidak ada tertulis pada surat maka dari itu tidak ada insentif bagi pelaksana koordinasi.

Kontinuitas perencanaan, dari BPBD Kabupaten Karo dan Dinas Sosial Kabupaten Karo sendiri selalu memiliki rencana kedepannya dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung, perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada sesuai dengan kebutuhan di lapangan, seperti contohnya pada awal bencana terjadi instansi terkait berencana membuat alat untuk mengetahui jika terjadi bencana dan hal tersebut sudah direalisasikan

sesuai rencana, ada pula saran dan menjadi perencanaan untuk membangun hunian bagi para korban bencana dan sekarang sudah terbangun di daerah relokasi siosar, hanya saja hasil kesepakatan maupun hasil rencana yang telah dibuat sebelumnya dapat berubah dengan melihat kondisi pada saat terjadinya bencana, seperti halnya di lokasi pengungsian sering terjadi perubahan kesepakatan karena melihat kondisi bagaimana pengungsi di pengungsian. Dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung tersebut tidak adanya umpan balik yang diterima BPBD Kabupaten Karo maupun Dinas Sosial Kabupaten Karo.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.

Arsyad, Azhar. 2002. Pokok-Pokok Manajemen, Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.

Emzir. 2016. Analisis Data. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Fuad, M, dkk. 2006. Pengantar Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Handyaningrat, 1989. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Cetakan Keenam. Jakarta. PT Gunung Agung.

_____, 2002. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung.

Hasibuan, Malayu S.P. 2006, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Jakarta: PT Bumi _____. 2009. Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara.

_____. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah-Edisi. Jakarta: PT Bumi Askara.

Kusumasari, Bevaola. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Gava Media.

Khambali, I. 2017. Manajemen Penanggulangan Bencana. Yogyakarta. CV. Andi Offset.

Miftah Thoha. 1995. Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku. Jakarta: CV Rajawali.

Moekijat. 1989. Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen Perusahaan. Bandung: Mandar Maju Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Siagian, Sondang P. 2005. Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara

State Services Commision. 2008. Factors for Successful Coordination – A Framework to Help State Agencies Coordinate Effectively. New Zealand: State Services Commission. ISBN 978-0-478-30327-8

Sugandha, Dann. 1991. Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi. Jakarta: Intermedia.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

_____. 2011. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.

Wirawan, I.B. 2013. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial,